



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 2615-2620

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Mewujudkan Pertumbuhan Yang Merata: Analisis Literatur Ekonomi Pembangunan Indonesia

Livia Dinda Syafitri¹, Syifa Say Putri², Precillia Manumpil³, Nursela Hanifah Ambarwati⁴, Arina Romarina⁵

Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sumatra Barat

liviadnda@gmail.com¹, syifasayputri@gmail.com², manumpilprecillia@gmail.com³,

nurselahanifahambarwati@gmail.com⁴, arina_romarina@ipdn.ac.id⁵

Abstrak

Pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, serta peningkatan kualitas hidup. Penelitian ini menganalisis perkembangan ekonomi pembangunan di Indonesia dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan studi literatur, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika, tantangan, dan peluang dalam proses pembangunan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia hingga kini masih menghadapi berbagai hambatan struktural, seperti ketimpangan pendapatan antarwilayah, pengangguran terselubung, tingkat kemiskinan yang masih signifikan, serta ketergantungan pada sektor-sektor tertentu seperti komoditas sumber daya alam. Kondisi ini menyebabkan proses pembangunan berjalan tidak merata dan kurang optimal dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun demikian, peluang untuk mempercepat pembangunan ekonomi masih terbuka lebar. Inovasi teknologi, digitalisasi ekonomi, penguatan sektor UMKM, peningkatan daya saing industri, serta optimalisasi kualitas sumber daya manusia menjadi faktor strategis yang dapat mempercepat transformasi ekonomi nasional menuju arah yang lebih produktif dan inklusif. Kajian ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan efektif tanpa kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator, sektor swasta sebagai penggerak produktivitas dan pencipta lapangan kerja, serta masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Dengan sinergi yang baik, pembangunan ekonomi Indonesia diharapkan dapat berjalan berkelanjutan, inklusif, dan mampu meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat.

Kata kunci: Ekonomi Pembangunan, Pertumbuhan, Ketimpangan, Inklusif

1. Latar Belakang

Ekonomi pembangunan merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana suatu negara, khususnya negara berkembang, berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui strategi pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan. Dalam pandangan Todaro dan Smith (2020), pembangunan ekonomi bukan sekadar peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan pendapatan per kapita, tetapi juga melibatkan perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, institusi sosial, serta kualitas hidup manusia. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi dapat dipahami sebagai proses multidimensional yang meliputi aspek ekonomi, sosial, politik, hingga budaya.

Bagi Indonesia, pembangunan ekonomi menjadi isu strategis karena menyangkut upaya transformasi dari negara berpendapatan menengah menuju negara maju. Tantangan yang dihadapi cukup kompleks. Pertama, ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah krusial. Rasio gini Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif dan belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan. Kedua, ketimpangan antarwilayah masih terlihat jelas, di mana kawasan barat Indonesia (seperti Jawa dan Sumatera) lebih berkembang dibandingkan kawasan timur (seperti Maluku dan Papua). Ketiga, urbanisasi yang masif mendorong migrasi penduduk ke perkotaan, sehingga menimbulkan permasalahan baru berupa pengangguran terselubung, kemiskinan perkotaan, hingga degradasi lingkungan.

Selain itu, struktur ekonomi Indonesia masih menghadapi ketergantungan pada sektor primer, terutama pertanian dan pertambangan. Sektor ini rentan terhadap fluktuasi harga global, perubahan iklim, serta keterbatasan inovasi teknologi. Hal ini berbeda dengan negara-negara maju yang telah melakukan transformasi struktural menuju industrialisasi dan sektor jasa modern. Rostow (1960) dalam teori “tahapan pertumbuhan

ekonomi” menegaskan bahwa negara berkembang perlu melewati fase transisi dari sektor tradisional menuju industrialisasi untuk mencapai modernisasi ekonomi. Dalam konteks ini, Indonesia masih menghadapi pekerjaan besar dalam mempercepat industrialisasi sekaligus meningkatkan daya saing global.

Sejalan dengan perkembangan global, Indonesia juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan revolusi industri 4.0 dan digitalisasi ekonomi. Kehadiran teknologi informasi membuka peluang baru untuk mendorong produktivitas, efisiensi, dan inklusivitas ekonomi. Namun, kesenjangan digital antarwilayah dan antar kelompok masyarakat justru berpotensi memperlebar jurang sosial jika tidak ditangani dengan tepat. Oleh karena itu, strategi pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga memastikan akses yang merata terhadap teknologi, pendidikan, dan peluang usaha.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, sebagaimana ditekankan oleh Brundtland Report (1987), pembangunan ekonomi harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan generasi sekarang dengan generasi mendatang. Artinya, pembangunan yang dilakukan tidak boleh merusak ekosistem atau mengorbankan kelestarian sumber daya alam. Konteks ini sangat relevan bagi Indonesia, mengingat negara ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, tetapi juga menghadapi tantangan serius berupa eksploitasi berlebihan, deforestasi, serta kerentanan terhadap perubahan iklim. Dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan peluang tersebut, pembangunan ekonomi Indonesia membutuhkan strategi komprehensif yang mengintegrasikan pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan. Pertumbuhan tanpa pemerataan hanya akan melahirkan ketimpangan, sementara pemerataan tanpa pertumbuhan akan menghambat kemajuan. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan yang mampu menyeimbangkan keduanya dengan melibatkan peran aktif pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil.

Pembangunan ekonomi secara konseptual tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan pendapatan nasional semata, melainkan juga sebagai proses yang kompleks, berkesinambungan, dan multidimensional. Todaro dan Smith (2020) mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses yang mencakup pertumbuhan ekonomi, perubahan struktural dalam perekonomian, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Pandangan ini mempertegas bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari indikator kuantitatif seperti Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga dari indikator kualitatif seperti distribusi pendapatan, tingkat kemiskinan, kualitas pendidikan, dan kesehatan. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan ekonomi harus dilihat dari transformasi yang terjadi dalam struktur sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Senada dengan itu, Sukirno (2019) menekankan bahwa pembangunan ekonomi juga merupakan rangkaian upaya sistematis untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Upaya ini meliputi perbaikan infrastruktur, industrialisasi, dan pengembangan sumber daya manusia sebagai faktor penentu daya saing ekonomi. Pandangan ini menggarisbawahi bahwa pembangunan ekonomi bukanlah proses yang instan, melainkan membutuhkan perencanaan yang matang, investasi jangka panjang, serta penguatan institusi yang mendukung keberlanjutan pertumbuhan. Sukirno juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat agar tidak menimbulkan kesenjangan ekonomi yang lebih besar.

Konsep pembangunan berkelanjutan yang diperkenalkan melalui Brundtland Report (1987) memperluas perspektif pembangunan ekonomi dari yang semula bersifat growth-oriented menjadi sustainability-oriented. Laporan ini menekankan bahwa pembangunan harus mampu memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya, pembangunan yang baik harus memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, pembangunan tidak lagi hanya dimaknai sebagai pencapaian target ekonomi jangka pendek, tetapi juga harus menjamin kelestarian sumber daya alam, keberlanjutan lingkungan hidup, dan inklusi sosial.

Integrasi ketiga pandangan tersebut—Todaro dan Smith (2020), Sukirno (2019), serta Brundtland Report (1987)—memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bahwa pembangunan ekonomi sejatinya adalah upaya holistik yang berorientasi pada kesejahteraan manusia dan keberlanjutan planet. Pembangunan ekonomi yang ideal tidak hanya mengutamakan pertumbuhan pendapatan nasional, tetapi juga memastikan kualitas hidup yang lebih baik, pemerataan hasil pembangunan, keberlanjutan ekosistem, dan keadilan antar generasi.

Lebih jauh lagi, pemikiran ini juga relevan untuk dijadikan pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional, termasuk di Indonesia. Dalam konteks negara berkembang, pembangunan yang efektif harus memadukan tiga dimensi utama: (1) pertumbuhan ekonomi yang inklusif, (2) penguatan kapasitas sumber

daya manusia yang berdaya saing, serta (3) pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kombinasi ini diyakini mampu mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja yang layak, dan menjaga stabilitas lingkungan untuk generasi mendatang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pembangunan ekonomi di Indonesia melalui pendekatan analisis deskriptif dan studi literatur. Kajian ini penting dilakukan agar dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang tantangan yang dihadapi serta strategi yang dapat ditempuh dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus menjadi masukan bagi perumusan kebijakan pembangunan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan studi literatur (library research). Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap konsep, dinamika, dan strategi pembangunan ekonomi melalui penelusuran berbagai sumber ilmiah yang kredibel. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, serta menginterpretasikan fenomena pembangunan ekonomi yang terjadi di Indonesia secara sistematis berdasarkan teori dan temuan sebelumnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku ekonomi pembangunan, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, laporan resmi pemerintah, serta publikasi internasional terkait isu pembangunan dan pembangunan berkelanjutan. Pemilihan sumber-sumber tersebut dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi, aktualitas, dan kredibilitasnya.

Tahapan dalam studi literatur ini meliputi:

1. Identifikasi sumber: Peneliti menelusuri literatur yang relevan dengan fokus penelitian, seperti teori pembangunan ekonomi menurut Todaro & Smith, Sukirno, dan konsep pembangunan berkelanjutan menurut Brundtland Report.
2. Klasifikasi data: Literatur yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan tema, misalnya teori pembangunan ekonomi, tantangan pembangunan di Indonesia, serta strategi pembangunan berkelanjutan.
3. Analisis isi (content analysis): Peneliti menelaah isi setiap literatur untuk mengidentifikasi pola, kesamaan, maupun perbedaan antar teori dan temuan yang telah ada.
4. Sintesis temuan: Data yang telah dianalisis disusun menjadi kerangka yang utuh sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena pembangunan ekonomi di Indonesia.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memaparkan fenomena pembangunan ekonomi yang terjadi, tetapi juga menghubungkannya dengan kerangka teoritis yang sudah mapan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai tantangan yang dihadapi Indonesia serta strategi yang dapat ditempuh untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Hasil dan Diskusi

1. Kondisi Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan tren yang relatif stabil, dengan rata-rata pertumbuhan PDB di kisaran 5% per tahun, meskipun pada tahun 2020 sempat mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19. Kondisi ini mencerminkan daya tahan (resilience) perekonomian Indonesia terhadap guncangan global, sekaligus menunjukkan potensi besar yang dimiliki dalam mengakselerasi pembangunan di masa depan.

Pasca-pandemi, pemulihan ekonomi ditandai dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga, ekspor komoditas, serta geliat sektor digital. Sektor jasa kini menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB nasional, khususnya pada bidang perdagangan, transportasi, informasi dan komunikasi. Industri manufaktur juga terus berkembang, terutama yang berorientasi ekspor seperti tekstil, otomotif, dan elektronik. Kehadiran ekonomi digital turut mendorong transformasi, dengan penetrasi e-commerce dan financial technology (fintech) yang semakin merata hingga ke daerah-daerah.

Meskipun demikian, sektor tradisional seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan masih menjadi penopang utama bagi sebagian besar masyarakat, khususnya di pedesaan. Kontribusi sektor ini tidak hanya terkait dengan ketahanan pangan, tetapi juga sebagai sumber lapangan kerja. Dengan kata lain, struktur perekonomian Indonesia masih berada dalam proses transisi dari ketergantungan pada sektor primer menuju dominasi sektor sekunder dan tersier. Transformasi struktural ini penting karena menentukan arah pembangunan jangka panjang, termasuk kemampuan Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

2. Tantangan Pembangunan Ekonomi

Meskipun mencatat kemajuan, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang bersifat struktural maupun sosial-ekonomi.

a. Ketimpangan distribusi pendapatan

Ketimpangan menjadi masalah utama yang membayangi pembangunan ekonomi. Rasio gini Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berada pada kisaran 0,38–0,40, yang berarti masih terdapat jurang antara kelompok kaya dan miskin. Ketimpangan ini juga mencerminkan rendahnya pemerataan pembangunan, di mana kelompok masyarakat di wilayah perkotaan lebih menikmati pertumbuhan dibandingkan mereka yang tinggal di pedesaan atau daerah terpencil. Jika tidak ditangani, ketimpangan ini berpotensi menimbulkan instabilitas sosial dan politik.

b. Keterbatasan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia

Infrastruktur fisik, seperti jalan, jembatan, transportasi publik, serta akses listrik dan internet, belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Kawasan timur Indonesia masih tertinggal dibandingkan kawasan barat. Selain itu, kualitas SDM juga masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan Human Development Index (HDI), Indonesia memang menunjukkan peningkatan, namun masih tertinggal dibandingkan beberapa negara tetangga di ASEAN. Rendahnya produktivitas tenaga kerja serta keterbatasan dalam penguasaan teknologi modern menjadi hambatan dalam meningkatkan daya saing global.

c. Urbanisasi dan pengangguran terselubung

Urbanisasi yang pesat telah meningkatkan jumlah penduduk di perkotaan secara signifikan. Namun, perpindahan tenaga kerja ke kota tidak selalu diiringi dengan ketersediaan lapangan kerja formal yang memadai. Akibatnya, banyak tenaga kerja terserap ke sektor informal dengan penghasilan rendah dan minim perlindungan sosial. Kondisi ini menciptakan fenomena pengangguran terselubung yang pada akhirnya menghambat efektivitas pembangunan dan menambah beban sosial di perkotaan.

d. Ketergantungan pada sektor primer dan fluktuasi global

Ekonomi Indonesia masih rentan terhadap gejolak global karena ketergantungannya pada ekspor komoditas primer, seperti batubara, minyak sawit, dan karet. Fluktuasi harga komoditas dunia sering kali berdampak langsung terhadap kinerja ekspor dan penerimaan negara. Hal ini menandakan perlunya diversifikasi ekonomi agar lebih tahan terhadap risiko eksternal.

3. Peluang dan Strategi Pengembangan

Di tengah tantangan tersebut, terdapat sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia: UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Namun, UMKM masih menghadapi keterbatasan akses pembiayaan, teknologi, dan pasar. Dukungan berupa kemudahan permodalan, digitalisasi usaha, serta pelatihan manajerial dapat memperkuat peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan inklusif. Dengan pemberdayaan yang tepat, UMKM juga berpotensi menjadi motor inovasi lokal yang mampu bersaing di pasar global.

Era revolusi industri 4.0 menghadirkan peluang besar bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi ekonomi. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas, termasuk bagi pelaku usaha kecil di daerah terpencil. Aplikasi digital, e-commerce, dan sistem pembayaran online mampu mempersempit kesenjangan ekonomi antarwilayah. Namun, agar inklusif, pemerintah perlu memastikan ketersediaan infrastruktur internet dan literasi digital yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah dengan mendorong hilirisasi industri. Misalnya, pengolahan nikel menjadi bahan baku baterai untuk kendaraan listrik dapat meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Selain itu, sektor pariwisata berkelanjutan, ekonomi kreatif, serta jasa berbasis teknologi memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Diversifikasi ini penting agar perekonomian lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal.

Konsep pembangunan berkelanjutan harus menjadi pedoman utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan mengorbankan generasi mendatang. Oleh karena itu, transisi menuju energi terbarukan, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta pengurangan emisi karbon menjadi langkah strategis yang tidak bisa diabaikan. Selain itu, dimensi sosial pembangunan juga harus diperhatikan, seperti perlindungan bagi kelompok rentan, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan yang merata.

Dari perspektif teori pembangunan, kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi semata belum cukup untuk mencapai kesejahteraan. Sejalan dengan pandangan Amartya Sen, pembangunan harus dipahami sebagai proses memperluas kapabilitas manusia, bukan sekadar peningkatan pendapatan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi Indonesia harus diarahkan pada strategi yang menyeimbangkan tiga dimensi utama: pertumbuhan (growth), pemerataan (equity), dan keberlanjutan (sustainability). Dengan strategi tersebut, pembangunan ekonomi Indonesia tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka pertumbuhan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan yang merata, inklusif, dan berdaya saing dalam jangka panjang.

3. Kesimpulan

Pembangunan ekonomi Indonesia terus mengalami kemajuan, namun berbagai tantangan struktural masih menjadi hambatan dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan merata. Ketimpangan pendapatan antarwilayah, pengangguran terbuka maupun terselubung, serta keterbatasan kualitas sumber daya manusia menunjukkan bahwa transformasi ekonomi belum sepenuhnya optimal. Kesenjangan ini turut dipengaruhi oleh ketergantungan pada sektor tertentu, rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta akses yang belum merata terhadap pendidikan, teknologi, dan peluang ekonomi. Untuk mempercepat pembangunan, Indonesia perlu menguatkan sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian karena kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan. Digitalisasi ekonomi juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi, serta memperluas inklusi ekonomi hingga ke daerah terpencil. Selain itu, diversifikasi sektor melalui pengembangan industri manufaktur, ekonomi kreatif, pariwisata, dan energi terbarukan diperlukan guna mengurangi ketergantungan pada komoditas primer dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Pembangunan berkelanjutan menjadi pilar penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi selaras dengan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Keberhasilan transformasi ekonomi Indonesia sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Sinergi ketiga aktor ini akan menentukan tercapainya pembangunan ekonomi yang inklusif, berdaya saing global, serta mampu meningkatkan kualitas hidup seluruh penduduk.

Referensi

1. Bappenas. (2021). Rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020–2024. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. BPS. (2022). Statistik Indonesia 2022. Badan Pusat Statistik.
3. BPS. (2023). Indeks pembangunan manusia 2023. Badan Pusat Statistik.
4. Dewi, N. P. (2021). Transformasi digital sebagai strategi percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 145–158.
5. Firmansyah, A. (2020). Peran UMKM dalam perekonomian nasional: Tantangan dan peluang di era digital. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(1), 33–47.
6. Haryanto, S. (2019). Kesenjangan ekonomi antarwilayah di Indonesia: Analisis konvergensi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 19(2), 205–221.
7. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). APBN kita: Kinerja dan fakta. Direktorat Jenderal Anggaran.
8. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2021). Strategi pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
9. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2020). Peta jalan industri 4.0: Making Indonesia 4.0. Kementerian Perindustrian.
10. Mahyudin, A. (2021). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomi*, 13(1), 77–91.

11. Munandar, H. (2020). Ekonomi pembangunan berkelanjutan: Teori dan praktik di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 9(2), 112–128.
12. Nugroho, R. (2021). Tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia: Perspektif ekonomi politik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(3), 201–220.
13. Prasetyo, B. (2022). Transformasi struktural ekonomi Indonesia: Dari sektor primer menuju industri dan jasa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 22(1), 59–74.
14. Purbaya, Y. (2021). Peran infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Daerah*, 13(2), 144–160.
15. Rahman, F. (2020). Analisis pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis global. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 21–36.
16. Santoso, D. (2022). Urbanisasi dan implikasinya terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 26(2), 98–115.
17. Setiawan, R. (2021). Pembangunan inklusif sebagai solusi ketimpangan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Sosial*, 17(1), 45–62.
18. Siregar, H., & Rachman, A. (2019). Ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi tantangan global. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Nasional*, 14(3), 187–200.
19. Sukirno, S. (2020). *Ekonomi pembangunan: Teori dan kasus*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
20. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). *Pembangunan ekonomi* (edisi ke-12, terjemahan). Jakarta: Erlangga.